



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG KEPEMUDAAN
KOMISI X DPR RI
KE KOTA BANDA ACEH
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021
19 S.D. 21 MARET 2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31.
2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
4. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 4 dan Pasal 174.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.
7. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI dilakukan dengan tujuan:

1. Menggali dan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan bidang kepemudaan di daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan pemuda di provinsi, kabupaten/kota yang dikunjungi.
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan bidang kepemudaan, khususnya terkait program kegiatan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda serta sarpras kepemudaan di provinsi, kabupaten/kota yang dikunjungi.
3. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rumusan mengenai Peta Jalan Pembangunan Kepemudaan, sebagai langkah-langkah strategis dan operasional yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Agenda Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI di Kota Banda Aceh adalah;

1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Aceh.
2. Pertemuan dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh.
3. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Provinsi Aceh.
4. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Kota Banda Aceh.
5. Pertemuan dengan Ketua Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.
6. Peninjauan langsung ke lapangan terhadap Prasarana dan Sarana Kepemudaan di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Kota Banda Aceh dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hadir pada kesempatan ini Drs. Samsudin dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

II. DATA KEGIATAN DAN MASUKAN KUNJUNGAN KERJA

A. Data Kepemudaan Banda Aceh

Berdasarkan data jumlah pemuda Banda Aceh 53.881 jiwa (sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh) dan jumlah penduduk Kota Banda Aceh berjumlah 252.899 jiwa (sumber data BPS tahun 2020). Menurut data tersebut, porsi pemuda mencapai 21% dari jumlah penduduk kota Banda Aceh.

- Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Kota Banda Aceh, terdapat 53 Organisasi kepemudaan yang ada di kota Banda Aceh, yaitu:
 1. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
 2. Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Ansor (PD GP Ansor)
 3. Pimpinan Daerah Fatayat Nahdlatul Ulama (PD Fatayat NU)
 4. Pimpinan Daerah Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (PD IPNU)
 5. Pimpinan Daerah Fatayat Nahdlatul Ulama (PD Fatayat NU)
 6. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM)
 7. Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PD NA)
 8. Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PD GPA)
 9. Pimpinan Daerah Ikatan Putra Putri Al Washliyah (PD IPA)
 10. Pimpinan Daerah Angkatan Putri Al Washliyah (PD APA)
 11. Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI)
 12. Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Kosgoro 1957 (DPD BMK '57)
 13. Dewan Pimpinan Daerah Wira Karya Indonesia (Depidar WKI)
 14. Dewan Pimpinan Daerah Baladhika Karya (DPD BK)
 15. Pimpinan Daerah Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PD AM-MDI)
 16. Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Organisasi Kemasyarakatan syawah Kekeluargaan Gotong Royong (DPD ORMAS GEMA MKGR)

17. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah (DPD IPTI)
18. Dewan Pengurus Daerah Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia (DPD GPPI)
19. Dewan Pengurus Daerah Ikatan Putra Putri Indonesia (DPD IPPI)
20. Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Kosgoro (DPD GM Kosgoro)
21. Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Gabungan Karya Rakyat donesia (DPD GM GAKARI)
22. Dewan Pengurus Daerah Generasi Muda TRIKORA (DPD GM TRIKORA)
23. Pimpinan Daerah Srikandi Pemuda Pancasila (PD Srikandi PP)
24. Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Islam (DPD PI)
25. Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Ka'bah (PD GPK)
26. Pimpinan Daerah Generasi Muda Persaudaraan Muslimin Indonesia (PD GM PARMUSI)
27. Pimpinan Daerah Angkatan Muda Ka'bah (PD AMK)
28. Pimpinan Daerah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PD GMPI)
29. Pimpinan Daerah Generasi Muda Pembangunan (PD GMP)
30. Pimpinan Daerah Pemuda Bulan Bintang (PD PBB)
31. Dewan Pimpinan Daerah Benteng Muda Indonesia (DPD BMI)
32. Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPD BM PAN)
33. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Muda Persaudaraan Pemuda Keadilan (DPD GEMA GARDA Keadilan)
34. Dewan Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Indonesia (DPD GPI)
35. Markas Daerah Pemuda Panca Marga (MD PPM)
36. Pimpinan Daerah-I Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI (PD-I GM FKPPPI)
37. Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik ndonesia (DPD PPAPRI)
38. Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI)
39. Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid ndonesia (DPD BKPRMI)
40. Pimpinan Daerah Pemuda Muslimin Indonesia (PD PMI)
41. Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Islam Indonesia (DPD AMII)
42. Dewan Pimpinan Daerah Generasi Muda Mathla'ul Anwar (DPD GEMA MA)
43. Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Partai Golkar (DPD AMPG)
44. Pemuda Reformasi Indonesia (PD PRI)
45. Dewan Pengurus Daerah Purna Prakarya Muda Indonesia (DPD PPMI)
46. Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Demokrat Indonesia (DPD PDI)
47. Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nasional Indonesia (DPD BPNI)
48. Dewan Pimpinan Daerah Kossi Dunia Pemuda (DPD KDP)
49. Dewan Pimpinan Daerah Barisan Muda Demokrat (DPD BM Demokrat)
50. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Iskandar Muda (DPD IPIM)
51. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Cinta Bangsa (DPD IPEUTABA)
52. Dewan Pimpinan Daerah Forum Bersama Pemuda Cinta Bangsa (DPD FORBES PEUCINSA)
53. Komite Sentral Organisasi Pemuda Kongres (KSO Pemuda Kongres)

- Sarana dan prasarana kepemudaan untuk level kecamatan ataupun gampong atau desa di Kota Banda Aceh masih belum memadai seperti balai kegiatan kepemudaan, sentra pemberdayaan pemuda dan pusat pelatihan dan pendidikan pemuda masih belum memadai karena anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang sangat terbatas.
- Selain melakukan pertemuan dengan Walikota Banda Aceh, tim rombongan kunjungan kerja spesifik juga melihat kelokasi wirausaha kepemudaan Banda Aceh yaitu ke kedai Badawi, kedai ini sebagai wadah untuk menjual hasil UMKM yang ada di Banda Aceh. Namun darisisi dukungan yang perlu di dorong pemerintah adalah pemberdayaan keseluruhan anak-anak muda harus ditingkatkan seliain itu perlunya dukungan dalam market terhadap UMKM lokal agar bias lebih luas jangkauan pemasarannya.
- Saat ini hasil karya anak-anak muda melalui kedai Badawi sudah bias mendistribusikan kopi khas Aceh ke negara-negara luar yaitu Singapur, Malaysia dan lainnya.

B. Kegiatan Kepemudaan Kota Banda Aceh

Partisipasi kepemudaan di Kota Banda Aceh sangat produktif dengan kreatifitas dan usaha-usaha bisnis yang di lakukan pemuda Aceh. Kreatifitas tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi anak-anak muda di daerah, sebagaimana yang disampaikan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh yaitu:

- Setiap tahun Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasi anggaran untuk pembangunan kepemudaan melalui Dispora Kota Banda Aceh. Dispora Kota Banda Aceh sendiri merupakan OPD baru yang baru terbentuk pada Tahun 2017.
- Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengadakan pelatihan terkait kewirausahaan Muda kepada 40 Orang bekerjasama dengan KNPI Kota Banda Aceh di Tahun 2020.
- Selain itu, Terkait Kepeloporan dan kepemimpinan Pemuda, Kegiatan yang telah dilaksanakan di Banda Aceh antara lain: Pemilihan Duta Wisata Agam Inong Kota Banda Aceh, Terminal Kreasi Aceh, Terminal kreasi Aceh merupakan suatu organisasi penggerak sosial yang awal didirikan pada tahun 15 April 2017, yang beranggotakan awal 15 orang. Tujuan awal dibentuk adalah sebagai wadah untuk mempermudah mengembangkan ide-ide kreatif pemuda di lingkungan sosial.
- Adapun beberapa kegiatan Terminal Kreasi Aceh antara lain:
 - a. Terminal peduli pantai. Program terminal peduli pantai ini pertama kali diinisiasikan oleh Reza Gunawan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda untuk lebih mau bertanggung jawab dengan sampah yang di bawa ke pantai, awal program ini di jalankan pada tahun 27 Januari 2018.
 - b. Terminal berbagi, yaitu program untuk mengumpulkan dan mengajak masyarakat untuk lebih mau berbagi khusus nya kepada masyarakat yang

kurang beruntung, seperti anak yatim, dhuafa, dan masyarakat ekonomi rendah.

- c. Terminal school, terminal school sendiri berdiri pada tahun 2018 Agustus yang beralamat di terminal labi-labi, kampung baru, Baiturrahman Banda Aceh. Tujuan didirikan terminal school itu sendiri adalah sebagai wadah bagi anak-anak di terminal dan jalanan agar mereka juga bisa mendapatkan tempat untuk menimba ilmu secara non formal untuk membangun generasi muda yang lebih baik.
- d. Terminal school menggunakan pendekatan dan metode persahabatan, berfungsi seperti guru BP di sekolah, tujuannya untuk dapat terus mengembangkan kemampuan potensi anak-anak agar mereka tidak salah dalam memilih gaya hidup di jalanan.

Secara kualitatif, perkembangan kepemudaan di Kota Banda Aceh telah berkembang, khususnya di aspek kewirausahaan, terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah pemuda yang mengajukan bantuan permodalan ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh. Terkait aspek kepeloporan dan kepemimpinan, telah tumbuh kesadaran pemuda dalam ikut serta merawat kelestarian lingkungan dan pemecahan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat.

C. Masukan Kunjungan Kepemudaan Banda Aceh

- Perlunya koordinasi dan sinkronisasi secara terus menerus dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat harus tetap dimaksimalkan, terutama terhadap penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan di Kota Banda Aceh karena terbatasnya kemampuan penganggaran di level kota.
- Meminta bantuan fasilitas Gedung untuk kepemudaan untuk KNPI Banda Aceh.
- Semakin digalakkan budaya berwirausaha dikalangan generasi muda sehingga diharapkan mereka akan menjadi para pelaku usaha dari pengusaha di usia muda yang akan berkontribusi besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu meminta pemerintah untuk mendorong usaha atau karya-karya anak bangsa/daerah agar mendapatkan akses dan pemasaran yang lebih luas di tingkat global.
- Di era keterbukaan informasi dan perkembangan jaman yang begitu cepat dan terbuka maka penguasaan bahasa dan teknologi menjadi sesuatu yang sangat penting, maka pemuda harus memiliki kemampuan menguasai berbagai Bahasa.
- Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengenal jati dirinya sehingga para pemuda dari generasi muda harus senang tiasa dibekali tentang identitas bangsa, kebudayaan dan kearifan lokal.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari kegiatan yang telah dilaksanakan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Kota Banda Aceh dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh bersama organisasi kepemudaan terus berupaya membangkitkan budaya berwirausaha dikalangan generasi muda sehingga diharapkan mereka akan menjadi para pelaku usaha dari pengusaha usia muda yang akan berkontribusi besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pemuda adalah pengganti estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang sehingga perlu mempersiapkan diri sejak dini melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan;
3. Di era keterbukaan informasi dan perkembangan jaman yang begitu cepat dan terbuka maka penguasaan bahasa dan teknologi menjadi sesuatu yang sangat penting, maka pemuda harus memiliki kemampuan menguasai berbagai bahasa;
4. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengenal jati dirinya sehingga para pemuda dari generasi muda harus senang tiasa dibekali tentang identitas bangsa, kebudayaan dan kearifan lokal;
5. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi secara terus menerus dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus tetap dimaksimalkan, terutama terhadap penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan di Kota Banda Aceh karena terbatasnya kemampuan penganggaran di level Pemerintah Kota.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Aceh yang telah menggandeng organisasi kepemudaan dalam membangkitkan budaya berwirausaha dikalangan generasi muda sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Mendorong Kemenpora RI untuk membuat berbagai program peningkatan kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan pemuda di daerah;
3. Mendorong Kemenpora RI untuk memfasilitasi program peningkatan kemampuan bahasa asing dan teknologi bagi pemuda, agar para pemuda memiliki daya saing dikancah global
4. Mendesak Kemenpora RI bekerjasama dengan K/L membuat program penguatan identitas bangsa, kesadaran kebudayaan dan optimalisasi kearifan lokal bagi Organisasi Kepemudaan di tingkat daerah;
5. Mendesak Kemenpora RI untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara terus menerus dengan pemerintah provinsi, terutama terhadap penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan di Kota Banda Aceh.

V . PENUTUP

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik

dalam bentuk rapat maupun menyampaikan secara langsung kepada perwakilan Kemenpora RI yang hadir.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Kota Banda Aceh pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ini, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan.

Jakarta, 21 Maret 2021

Ketua Tim,

Ttd.

drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.
A-489